

STRATEGI LINGUISTIK DALAM WACANA POLITIK

Ni Wayan Sartini

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga

e-mail yaniwiratha@yahoo.com

George Orwell mengatakan bahwa pada zaman ini tidak mungkin orang bisa lepas dari politik. Semua masalah adalah selalu masalah politik (1946:154). Politik adalah masalah kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain dan sering juga mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain. Bahkan, keputusan-keputusan biasa yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari pun bisa dipandang dari sudut politik (Jones & Wareing, 1999:49). Wacana politik yang dilontarkan oleh politisi bertujuan untuk membujuk para pendengar atau warga masyarakat agar percaya pada validitas dari klaim-klaim politisi. Untuk mencapai tujuan ini, para politisi menggunakan strategi linguistik (bahasa) agar terkesan wajar dan masuk akal. Strategi tersebut antara lain menggunakan implikatur. Implikatur adalah strategi linguistik dalam politik agar pendengar dapat memahami sendiri asumsi-asumsi di balik sebuah informasi tanpa harus mengungkapkan asumsi-asumsi itu secara eksplisit. Strategi linguistik yang lainnya adalah penggunaan eufemisme, gaya bahasa (metafora), leksikalisasi, istilah atau jargon-jargon dan struktur gramatika. Berkaitan dengan struktur bahasa, para politisi cenderung menggunakan kalimat yang panjang dan kalimat pasif.

Kata-kata kunci: strategi linguistik, politik, tujuan.

Pendahuluan

Politik adalah masalah kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain dan sering kali juga mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain (Thoman & Shan Wareing, 2007:50). Bahkan, keputusan-keputusan biasa yang dibuat sehari-hari pun dapat dipandang dari sudut politik. Politik dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu itulah politik sangat berperan.

Politik dapat mencakup banyak jenis kegiatan, seperti (1) proses pembuatan kebijakan nasional (politik pemerintahan), (2) kesetaraan gender (politik seksual), (3) persaingan dalam kelompok yang erat jalinannya, seperti persaingan antarrekan sekantor dalam memperebutkan jabatan yang biasanya dilakukan dengan membocorkan atau menyimpan rahasia (politik kantor), (4) cara orang menegosiasikan peran yang harus mereka jalankan dalam kehidupan pribadi mereka, (5) sejarah sistem politik, dan (6)

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan transportasi, pemukiman dan konsumsi yang dapat mempengaruhi lingkungan (politik lingkungan). Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak bisa lepas dari masalah politik.

Bahasa tidak pernah lepas dari politik, betapa fobia pun sebagian di antara kita akan politik itu. Memilih memakai bahasa atau kata-kata tertentu, menekankan pengertian tertentu atas kata, bahkan memakai dialek tertentu, tidak lain dari berpolitik dalam maknanya yang paling dalam dan luas (Pabottinggi, 1990:23). Bahasa bukan semata-mata alat komunikasi atau sebuah sistem kode atau nilai yang secara sewenang-wenang menunjuk sesuatu realitas monolitik. Bahasa adalah suatu kegiatan sosial. Secara sosial ia terikat, dikonstruksi, dan direkonstruksi dalam kondisi khusus dan setting sosial tertentu, ketimbang tertata menurut yang diatur secara ilmiah dan universal (Heryanto, 1990).

Bahasa lewat artikulasi kebahasaan memengaruhi tindakan-tindakan politik. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran penting dalam telaah ilmu sosial (Hikam,1996:77). Selanjutnya dikatakan, dalam telaah politik, akhir-akhir ini pemahaman lewat bahasa (*language discourse*) semakin diakui pentingnya, terutama setelah muncul pascamodernisme dan pascastrukturalisme dalam kancah filsafat dan epistemologi modern. Bahasa dan praktik kebahasaan tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yaitu sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan sosial-politik. Namun, semakin disadari bahwa bahasa di dalam dirinya tampil sebagai representasi dari dan ruang bagi penggelaran berbagai macam kuasa. Oleh karena itu, bahasa lantas dilihat pula sebagai salah satu ruang tempat konflik-konflik berbagai kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni dan hegemoni tandingan terjadi.

Pandangan Bahasa dalam Konsep Wacana Kritis

Dalam politik, bahasa digunakan tidak sekadar berkomunikasi, tetapi digunakan untuk maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivisme-empirisme, yang kedua disebut konstruktivisme, sedangkan yang ketiga disebut pandangan kritis. Pandangan

ketiga ini mengoreksi pandangan konstruktivisme yang dianggap kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional (Eryanto,2000:6).

Selanjutnya dikatakan bahwa bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa; batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam konteks politik, digunakan berbagai strategi untuk tujuan-tujuan tertentu. Salah satu strategi tersebut adalah strategi kebahasaan atau strategi linguistik. Untuk mencapai tujuan dan mendapat efek tertentu, pembicara dalam hal ini politisi memaksimalkan bahasa dengan berbagai pirantinya. Hal ini dilakukan karena para politisi sadar bahwa bahasa itu memiliki efek yang sangat dahsyat dalam rangka membentuk opini atau mengubah opini masyarakat dan bahkan membentuk subjek-subjek tertentu dengan kehebatan bahasa. Pengguna bahasa atau pembicara mengetahui bukan hanya aturan-aturan tata bahasa, kalimat, namun juga aturan-aturan untuk menggunakan unit-unit yang lebih besar dalam menyelesaikan tujuan-tujuan pragmatik dalam situasi sosial (Sobur,2004:49). Bahasa digunakan dengan suatu strategi guna mencapai tujuan yang diinginkan seperti membuat permohonan, mendapat giliran, bersifat sopan, atau memperoleh kerja sama.

Strategi Linguistik dalam Wacana Politik

Strategi adalah cara yang digunakan atau ditempuh pembicara untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini, cara yang digunakan oleh para politisi dalam kancah perpolitikan memiliki maksud dan tujuan tertentu pula. Salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan strategi linguistik atau bahasa. Wacana tidak pernah lepas dari konteks politik, bahasa tidak bermakna konvensional, melainkan

bahasa untuk memengaruhi atau bahkan membongkar praktik-praktik kekuasaan. Wacana politik dilandaskan pada satu prinsip, yaitu bahwa persepsi orang terhadap masalah-masalah atau konsep tertentu bisa dipengaruhi oleh bahasa. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh politisi adalah membujuk para pendengar atau warga masyarakat agar percaya pada validitas dari klaim-klaim seorang politisi. Berikut ini adalah strategi-strategi linguistik dalam wacana politik.

Menurut van Dijk (2004:51, dalam Mandarani, 2013:20), ada berbagai strategi yang digunakan dalam konteks politik untuk pencitraan baik tokoh maupun partai. Di antara strategi yang diajukan van Dijk tersebut beberapa di antaranya merupakan strategi linguistik. Strategi itu antara lain strategi pengajuan eufemisme, strategi hiperbola, strategi implikasi, strategi ironi, strategi leksikalisasi, strategi metafora, strategi penggambaran negatif pihak lain, pengajuan ungkapan normatif, dan strategi persangkaan (presuposisi). Strategi-strategi tersebut memaksimalkan penggunaan bahasa untuk tujuan-tujuan tertentu.

Implikatur

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah implikatur. Implikatur adalah cara di mana pendengar bisa memahami sendiri asumsi-asumsi di balik sebuah informasi tanpa harus mengungkapkan asumsi-asumsi itu secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah informasi tambahan yang bisa dideduksi dari sebuah informasi tertentu (Jones dan Waering, 1999). Sejalan dengan itu, Grice mengemukakan bahwa implikatur ialah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda itu adalah maksud pembicara yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dapat dikatakan bahwa implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi (Ahmad dan Abdullah, 2013:37). Van Dijk menyebut strategi ini dengan strategi implikasi (*implication*), yaitu pembicara tidak selalu harus mengungkapkan apa yang diketahui atau diyakini secara eksplisit.

Implikatur berkaitan erat dengan pengupasan makna dalam komunikasi. Wacana harus dikupas untuk memahami maksud dan makna yang ingin disampaikan. Dengan menggunakan strategi linguistik, khususnya pragmatik ini, perasaan wajar dan masuk